



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Laporan situasi di pengadilan-pengadilan distrik/negeri  
Disampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi**

**Pengantar**

Kamu menyampaikan dokumen ini untuk menginformasikan situasi beberapa krusial di pengadilan-pengadilan negeri yang ditemukan oleh JSMP berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara dengan beberapa ketua pengadilan negeri. Dalam laporan situasi ini kami menggunakan Pengadilan Negeri Suai sebagai referensi dan akan menyinggung masalah-masalah sejenis yang dihadapi oleh pengadilan negeri lainnya. Kami bersedia untuk mendiskusikan temuan-temuan tersebut jika Yang Mulia bersedia dan dianggap perlu untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai situasi yang kami laporkan.

Kami meyakini bahwa Pengadilan Tinggi selaku pengadilan tertinggi saat ini di Timor-Leste memiliki prioritas tersendiri, namun kami memandang penting untuk memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang kami himpun sejauh ini. Situasi-situasi tersebut seringkali mempengaruhi kualitas operasional keseharian dan fungsi regular pengadilan. Kami juga percaya bahwa Yang Mulia memiliki pengetahuan mengenai perihal-perihal tersebut akan tetapi kami juga menyadari bahwa barangkali sedang sibuk dengan agenda prioritas lainnya, sehingga tidak sempat memberikan perhatian yang memadai mengenai situasi dan masalah-masalah tersebut. Dengan demikian dokumen ini bersifat informasi dengan maksud untuk memberitahukan kembali Yang Mulia untuk segera mencari jalan keluar atas masalah-masalah tersebut tanpa penundaan yang tidak diperlukan.

Dalam laporan tahunan JSMP– Tinjauan Umum Sektor Peradilan (TSP) 2018<sup>1</sup>, dan laporan tahunan lainnya kami telah memaparkan persoalan-persoalan di semua pengadilan dan merekomendasikan untuk dicarikan solusinya. Namun pada beberapa bulan terakhir kami terus mencatat persoalan lain di Pengadilan – Suai yang tengah menghadapi masalah serius mengenai bahan bakar, transportasi, masalah air dan kebersihan di lingkungan pengadilan, fasilitas/peralatan yang terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali, sehingga mempengaruhi produktifitas dan kualitas kerja dan pelayanan di pengadilan.

Persoalan-persoalan yang ditemukan JSMP beberapa diantaranya telah terjadi sejak tahun 2015 dan sebagian lainnya merupakan konsekuensi atau sebagai hasil langsung dari dinamika situasi kebuntuan politik yang dihadapi semua komponen negara, secara khusus pada tahun 2017 dan 2018.

Berikut adalah persoalan-persoalan yang diidentifikasi JSMP di semua pengadilan negeri:

**1. Pengadilan Distrik/Negeri Suai (PDS)**

Berdasarkan pemantaun JSMP sejak tahun 2017, lembaga pengadilan pada umumnya menderita konsekuensia dari anggaran yang sangat minim/terbatas untuk menjawab kebutuhan harian dan

---

<sup>1</sup> Halaman 16 -19 Laporan Tinjauan Umum Sektor Peradilan 2018, di <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/OJS-2018-report-TETUM.pdf>;

regular, terutama di Pengadilan Suai. Situasi ini diperkuat oleh Hakim Alvaro Maria Freitas, selaku Hakim Ketua Pengadilan Suai<sup>2</sup>.

### **1.1 Bahan bakar terbatas untuk transportasi operasional**

Persoalan mengenai ketersediaan bahan bakar yang kurang merupakan masalah serius sejak tahun 2017 hingga hari ini. Pengadilan Distrik Suai nyaris melakukan pekerjaan sehari-hari dengan penyediaan bahan bakar yang sangat terbatas, sehingga pengadilan tidak mengeluarkan surat perintah kepada para pihak beberapa bulan terakhir ini. Dalam beberapa kesempatan pengadilan sering kali harus menunda persidangan karena para pihak tidak mendapatkan surat panggilan resmi oleh pengadilan namun hanya ditiptkan kepada orang lain, seperti polisi, atau melalui otoritas lokal atau melalui pihak lain yang hadir di pengadilan. Oleh karena itu ketika para pihak tidak hadir di persidangan, pengadilan harus menunda persidangan untuk jangka waktu yang cukup lama agar menunggu kapan bahan bakar tersedia sehingga pengadilan dapat memanggil para pihak<sup>3</sup>. Keterbatasan dan kekurangan ini menyebabkan baik hakim, panitra pengadilan dan sekretaris pengadilan harus mengeluarkan dana pribadi untuk mengisi bahan bakar untuk mobil dan motor operasional guna mendistribusikan surat perintah pembebasan dan dokumen relevan lainnya.

### **1.2 Kendaraan operasional kurang**

Saat ini Pengadilan Distrik Suai hanya memiliki satu mobil operasional untuk mengirim surat rogatori, mengeluarkan surat perintah, permohonan untuk Pengadilan Banding, untuk mengangkut panitra pengadilan ke pengadilan keliling, serta untuk menyampaikan pemberitahuan yang berkaitan dengan empat pengadilan distrik, yang meliputi Covalima, Kabupaten /Kotamadya Manufahi, Maliana dan Ainaro. Namun mobil ini telah rusak, jadi ketika ada pemberitahuan mendesak, sekretaris kehakiman harus menyediakan mobil dan mengangkut panitra pengadilan untuk mendistribusikan surat perintah atau pemberitahuan.

### **1.3 Sanitasi, air bersih dan kamar kecil**

Dari 2015 hingga sekarang Pengadilan Distrik Suai belum dapat menyediakan kamar kecil bagi pengunjung karena kurangnya air bersih. Situasi ini sangat berdampak baik terhadap pengunjung, aktor peradilan dan panitra pengadilan, serta pihak-pihak yang akan diproses di pengadilan ini. Selama bertahun-tahun pengadilan harus meminta petugas *bombeirus* untuk menyediakan air pada waktu-waktu tertentu dan/atau hanya mengandalkan air hujan. Namun, pada musim kemarau para aktor peradilan harus pulang-pergi ke kediaman mereka dan petugas panitera pengadilan harus meminta/menumpang kepada anggota masyarakat di sekitar lingkungan pengadilan untuk dapat menggunakan kamar kecil mereka.

Sebagaimana dibahas dalam Siaran Pers JSMP yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2019, JSMP menemukan bahwa situasi ini juga telah memiliki dampak serius terhadap para korban anak di bawah umur yang menderita pemerkosaan atau pelecehan seksual yang perlu ke kamar mandi. JSMP percaya bahwa dalam keadaan seperti itu korban harus menahan diri sampai mereka pulang. Hal ini karena secara psikologis mereka tidak merasa aman atau terlindungi

---

<sup>2</sup> Siaran Pers- <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/Tribunál-Distritál-Suai-sofre-problema-sériu-kona-ba-kombustível-ba-transporte-operasionál-desde-Janeiru-2019-no-prejudica-funsionamentu-regular-tribunál-refere-27-Maiu-2019-2.pdf>

<sup>3</sup> Wawancara dengan Hakim Alvaro Maria Freitas, Ketua Pengadilan Negeri Suai -Maret 2019

untuk meminta kamar mandi dari masyarakat di sekitar lingkungan pengadilan karena trauma atau tekanan yang mereka rasakan sebagai korban kekerasan dan pelecehan.

#### **1.4 Keterbatasan ruang persidangan-sarana dan ruang untuk objek pidana**

Pengadilan Distrik Suai hanya memiliki dua ruang persidangan yang tersedia untuk enam hakim. Kadang-kadang ketika ada banyak agenda sidang, para pihak harus menunggu karena ruang pengadilan sedang digunakan.

Pengadilan juga tidak memiliki ruang khusus untuk obyek kejahatan. Pengadilan Distrik Suai harus menyimpan banyak bensin yang disita dari terdakwa yang melakukan kejahatan penyelundupan (secara ilegal mengimpor bahan bakar melintasi perbatasan), tetapi karena kurangnya ruang, objek-objek kejahatan ini harus disatukan dengan kasus arsip dengan risiko kontaminasi, korupsi dan / atau perusakan, kerusakan atau pemalsuan.

Selain itu, tidak ada cukup komputer untuk panitra pengadilan karena terdapat enam orang petugas panitera pengadilan yang berbagi kantor tetapi hanya ada 3 komputer yang tersedia, sehingga mereka harus bergiliran untuk mencatat proses persidangan kasus. Pengadilan Distrik Suai juga memiliki masalah dengan printer besar di bagian kriminal karena sudah rusak sejak 2017, sehingga panitra pengadilan harus mengantri untuk mencetak dokumen mereka dari printer besar di ruang sentral/pusat.

Pengadilan Distrik Suai juga memiliki kekurangan fasilitas, seperti kursi dan meja karena beberapa dari mereka rusak dan lemari arsip semuanya rusak dan banyak file ditumpuk di atas meja dan lantai. Selain itu, tiga AC di area kerja petugas kehakiman sudah tidak berfungsi sejak 2017 yang berarti bahwa petugas harus pergi ke luar ruang kerja selama jam kerja karena mereka tidak tahan panas di dalam ruangan dan tidak ada sirkulasi udara.

#### **1.5 Jumlah panitera pengadilan tidak cukup**

Pengadilan Distrik Suai juga kekurangan petugas peradilan karena hanya ada enam petugas yang membantu enam hakim untuk mempersiapkan persidangan dan membantu mereka selama persidangan, untuk memberi tahu para pihak, mengeluarkan perintah dan mengantre di bank untuk mentransfer uang dari hasil hukuman denda dan biaya pengadilan yang dibayarkan oleh para terpidana.

Ini telah secara serius mempengaruhi panitra pengadilan karena mereka harus melakukan banyak tanggung jawab sesuai dengan uraian pekerjaan mereka dan banyak bepegian. Situasi ini muncul karena tidak adanya keseimbangan antara distribusi pekerjaan dan sumber daya yang tersedia. Situasi ini terbalik di Pengadilan Distrik Oecusse yang memiliki satu hakim dan enam panitra pengadilan .

## **2. Pengadilan Distritik Dili (PDD)**

Situasi di sini hampir sama dengan pengadilan lain. Misalnya Pengadilan Distrik Dili tidak memiliki cukup laptop untuk hakim karena beberapa di antaranya rusak dan tidak ada laptop untuk hakim peserta pelatihan. Pengadilan Distrik Dili juga memiliki masalah dengan Pendingin Udara di ruang pengadilan utama yang tidak berfungsi dengan baik dan telah rusak untuk waktu yang lama. Pendingin Udara yang rusak membuat banyak kebisingan selama uji coba yang

merugikan pengunjung dan memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan mengikuti proses dengan benar karena mereka tidak dapat mendengar dengan baik.

Pengadilan Distrik Dili juga memiliki masalah dengan printer dan toner yang terbatas untuk para hakim di bagian pidana dan seksi sipil. Ini adalah masalah karena hakim yang berurusan dengan file kasus harus mencetak file setiap hari tetapi mereka perlu menggunakan printer kecil yang tidak sebanding dengan kebutuhan pengadilan. Juga, bagian kriminal dan sipil harus menunggu untuk mencetak semua kasus karena hanya ada satu printer besar. Printer telah disewa oleh pengadilan dari perusahaan swasta sejak 2017 dan ketika rusak mereka harus menunggu untuk diperbaiki. Ada juga masalah dengan toner untuk printer karena seringkali kebutuhan pengadilan tidak terpenuhi karena jumlah toner yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Misalnya, ada dua bagian yang biasanya menggunakan 10 isi ulang toner setiap bulan. Namun Pengadilan Tinggi hanya mampu menyediakan lima isi ulang toner setiap bulan.

Masalah lain yang dicatat oleh JSMP termasuk fakta bahwa tidak semua persidangan di Pengadilan Distrik Dili dapat direkam karena hanya tiga ruang pengadilan yang memiliki alat perekam. Faktanya, Pengadilan Distrik Dili memiliki lima ruang pengadilan dan perekam untuk dua lainnya telah rusak selama dua tahun terakhir. Selain itu, walaupun Pengadilan Distrik Dili memiliki lima ruang pengadilan, terkadang ada banyak kasus dan para pihak harus menunggu karena semua ruang pengadilan penuh.

Masalah lain yang dialami pada tahun 2018 termasuk Pengadilan Distrik Dili tidak memiliki kas kecil untuk menanggapi keadaan mendesak di pengadilan seperti bahan bakar untuk mobil operasional ketika memeriksa sebuah adegan atau pengadilan keliling, untuk membeli makanan untuk para pihak karena mereka harus menunda mendengar dan membeli bahan-bahan seperti bola cahaya, memperbaiki keran, dan kebutuhan lain di pengadilan. Juga, Pengadilan Distrik Dili hanya memiliki dua mobil dan delapan sepeda motor untuk keperluan operasional yang mencakup distrik Dili, Ermera, Liquica dan Aileu. Fasilitas-fasilitas ini tidak memadai karena Pengadilan Distrik Dili berada di ibu kota dan yurisdiksinya mencakup distrik-distrik dengan jumlah penduduk yang besar dan banyak kasus.

### **3. Pengadilan Distrik Baucau (PDB)**

Pengadilan Distrik Baucau tidak memiliki komputer untuk petugas peradilan di bagian pidana, bagian sipil dan daerah pusat karena Pengadilan Distrik Baucau memiliki 18 panitra pengadilan<sup>4</sup>. Juga, sebagaimana dibahas di atas, Pengadilan Distrik Suai hanya memiliki enam panitra pengadilan. JSMP percaya bahwa distribusi sumber daya tidak setara dan tidak realistis. JSMP mengamati bahwa situasi ini menyebabkan dua panitra pengadilan harus berbagi satu komputer untuk mengetik transkrip pengadilan dan dokumen resmi lainnya. Pengadilan Distrik Baucau juga hanya memiliki satu mobil dan enam sepeda motor untuk kebutuhan operasional, tetapi yurisdiksinya mencakup distrik-distrik yang sangat besar seperti Baucau, Viqueque, Lospalos dan Manatuto.

JSMP juga mengamati bahwa ruang kantor yang disediakan untuk hakim dan panitra pengadilan sangat sempit. Selain itu, tidak ada ruang untuk pembela umum/pengacara, JPU dan pihak-pihak dan juga tidak ada tempat untuk menyimpan objek kejahatan. Pada tahun 2016 jumlah hakim di

---

<sup>4</sup> Jumlah panitra pengadilan meningkat dari 14 menjadi 18 pada tahun 2018

Pengadilan Distrik Baucau meningkat menjadi tujuh<sup>5</sup> dari total enam selama beberapa tahun terakhir dan hanya ada tiga ruang kantor yang tersedia untuk para hakim, sehingga mulai tahun 2016 dua hakim telah berbagi ruang kerja yang sangat terbatas dan file kasus bertumpuk. Situasi mempengaruhi panitra pengadilan di bagian pidana atau bagian sipil harus bekerja di ruangan yang sangat terbatas.

Pengadilan Distrik Baucau juga tidak memiliki ruangan terpisah untuk menyimpan objek-objek kejahatan karena sejak 2015 dan hingga kini, Pengadilan Distrik Baucau memutuskan untuk menyimpan objek-objek kejahatan di ruang pengadilan dan menutupinya dengan tripleks. Pengadilan Distrik Baucau juga tidak memiliki ruang tunggu untuk saksi dan korban serta untuk pembela umum / pengacara swasta, jaksa dan para pihak. JSMP menemukan bahwa seringkali para pembela umum dan jaksa penuntut harus menunggu di depan pengadilan untuk memulai persidangan.

Sangat penting untuk memiliki ruang tunggu khusus untuk pengacara/jaksa karena sebelum pergi ke pengadilan mereka harus mempersiapkan diri dan pengacara/pembela umum perlu berbicara dengan klien mereka dan jaksa penuntut umum juga perlu berbicara dengan korban atau saksi sebelum persidangan dimulai.

#### **4. Pengadilan Distrik Oecusse (PDO)**

JSMP mencatat bahwa selama lebih dari sepuluh tahun Pengadilan Distrik Oekusi hanya memiliki satu hakim yang juga berperan sebagai ketua/administrator pengadilan ini, dan enam orang panitera pengadilan. Alokasi sumber daya manusia ini sangat tidak seimbang dan telah menempatkan beban besar pada hakim karena distribusi sumber daya yang tidak merata tersebut. Dalam banyak kesempatan JSMP telah mengunjungi dan berbicara dengan hakim Ketua Pengadilan Distrik Baucau, João Ribero, yang telah membagi keprihatinannya tentang manajemen dan distribusi sumber daya versus beban kerja. Ini tidak menguntungkan untuk kasus-kasus yang perlu disidangkan melalui majelis hakim karena perlu waktu untuk mengatur dengan para hakim dari Dili dan bagi mereka untuk bepergian. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kantor Kejaksaan Umum di Oekusi memiliki dua jaksa dan hanya satu hakim. Ini berarti bahwa tidak hanya menempatkan hakim harus bekerja ekstra keras untuk mengatur waktu dan menjadwalkan persidangan, akan tetapi harus berurusan dengan sumber daya yang bukan hanya terbatas, tetapi pada kenyataannya sumber daya manusia yang tidak cukup.

Sama halnya seperti dengan keadaan Pengadilan Distrik Baucau, Pengadilan Distrik Oekusi juga tidak memiliki cukup komputer untuk panitra pengadilan dan penerjemah karena ada enam panitra pengadilan dan hanya ada empat komputer desktop dan dua penerjemah tidak memiliki komputer. Situasi ini berarti bahwa panitra pengadilan harus bergiliran untuk bekerja dan harus menunda banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Juga, di Pengadilan Distrik Dili memiliki satu mobil/kendaraan operasional tetapi telah dirusak sejak 2015 dan telah disiapkan untuk dilelang. Ini berarti bahwa banyak persidangan telah ditunda karena petugas tidak dapat memberikan pemberitahuan ketika hujan turun deras. Selain itu, jarak yang jauh juga menjadi tantangan saat memberikan notifikasi/pemberitahuan melalui sepeda motor.

---

<sup>5</sup> Jumlah hakim bertambah dari 4 orang menjadi 7 pada dua tahun terakhir

## **5. Ruang khusus untuk saksi dan korban**

JSMP juga mencatat bahwa sampai hari ini hampir semua pengadilan tidak memiliki tempat terpisah untuk saksi dan korban (korban) ketika ada kebutuhan untuk melindungi identitas mereka sesuai dengan hukum.

Pasal 4 UU 2/2009 tentang Perlindungan Saksi, yang berkaitan dengan penyembunyian saksi, menyatakan bahwa pengadilan dapat memutuskan, baik secara sepihak, atau atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, atau atas permintaan terdakwa atau saksi, bahwa kesaksian atau pernyataan tersebut harus diambil dengan cara menyembunyikan wajah saksi atau mengubah suaranya, atau keduanya, alih-alih mengambil bentuk tindakan prosedural publik atau pemeriksaan silang, untuk menghindari pengakuan saksi.

JSMP percaya bahwa ruangan khusus dan terpisah untuk saksi dan korban adalah wajib menurut hukum untuk memastikan bahwa dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender, saksi dan korban akan diberikan perlakuan yang menguntungkan karena mereka akan merasa lebih aman jika tidak ada kontak atau interaksi dengan terdakwa sebelum suatu persidangan. Juga, dalam kasus-kasus penting yang melibatkan kejahatan yang ditandai dengan korupsi, pembunuhan, kelompok bela diri, pengadilan wajib melindungi saksi untuk memastikan keselamatan pribadi mereka atau keluarga mereka atau harta benda mereka karena mereka memberikan kontribusi pada administrasi peradilan dan penegakan hukum dan kebenaran.

## **6. Rekomendasi**

Berdasarkan keadaan-keadaan yang ditemukan dan dibahas di atas, JSMP merekomendasikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. Meminta Presiden Pengadilan Tinggi untuk mengunjungi pengadilan distrik atau mengirim tim untuk mencari informasi dan mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi untuk menyelesaikan keadaan ini tanpa penundaan yang tidak semestinya.
2. Memastikan pendanaan untuk kebutuhan operasional yang mencakup pekerjaan inti pengadilan untuk memastikan bahwa persidangan dapat dilakukan seperti biasa;
3. Mempersiapkan rancangan rencana anggaran belanja yang realistis dan realitas tentang anggaran belanja negara setiap tahun atau adakan pertemuan terpisah dengan Komite terkait di Parlemen Nasional untuk mempresentasikan dan mendiskusikan keadaan-keadaan ini.
4. Pengadilan Banding juga dapat mengidentifikasi prioritas yang memerlukan intervensi dan penyediaan solusi untuk menghindari keadaan ini terjadi di masa depan dan memastikan bahwa pengadilan dapat bekerja dengan sumber daya yang memadai dan dengan cara yang bermartabat;
5. Menilai kembali sumber daya yang didistribusikan ke pengadilan distrik dan memastikan bahwa pengadilan menerima dukungan dengan kondisi yang adil dan menghindari alokasi sumber daya yang tidak setara.

Cc/Lampiran:

1. Presiden Komite A dari Parlemen Nasional tentang Keadilan, Konstitusi dan Pemerintahan yang Bersih

2. Presiden Komite C tentang Keuangan Publik
  3. Kementerian Reformasi Legislatif dan Masalah Parlemen
  4. Kementerian Kehakiman
  5. Ketua Pengadilan Distrik Dili
  6. Ketua Pengadilan Distrik Baucau
  7. Ketua Pengadilan Distrik Oekusi
  8. Ketua Pengadilan Distrik Suai
  9. Kantor Kejaksaan Agung
  - 10 Kantor Pembela Umum
- Arsip

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Email: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)  
Situs web: <http://jsmp.tl/>